

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dunia pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam proses meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, manusia dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Pasal 1 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa:

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Berdasarkan sistem pendidikan tersebut, pendidikan dilakukan secara terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik. Menyadari pentingnya proses peningkatan kualitas peserta didik yang merupakan penerus generasi yang akan datang, maka pemerintah terus berupaya melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang lebih berkualitas dengan cara meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Indonesia. Menurut Sukirno (dalam Nugroho, 2016, hlm. 2) menyatakan bahwa untuk merealisasikan usaha meningkatkan mutu pendidikan perlu adanya pembenahan dari segi sumber daya manusia dan juga lembaga penyelenggara pendidikan, semua itu didukung oleh sumber daya pendidikan yang layak. Sumber daya pendidikan tersebut antara lain: tenaga ahli atau guru, manajemen, kurikulum, sarana dan prasarana, serta dana yang diberikan oleh pemerintah, masyarakat, maupun dari keluarga peserta didik baik secara sendiri-sendiri maupun dalam bentuk kerjasama (Nugroho, 2016, hlm. 2). Artinya, semua komponen, yaitu pemerintah, masyarakat, dan keluarga saling bersinergi untuk menyelenggarakan pendidikan secara baik.

Pemerintah melakukan berbagai usaha dalam meningkatkan mutu pendidikan agar lebih berkualitas diantaranya seperti pengembangan dan perbaikan kurikulum, pengembangan sistem evaluasi pendidikan, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, serta pelaksanaan kegiatan pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan. Namun, pada kenyataannya upaya pemerintah tersebut belum cukup berarti dalam meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan yang ada di Indonesia terutama dalam pendidikan anak usia dini. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 137 Pasal 25 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, tertera bahwa kualifikasi akademik guru PAUD seharusnya memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) namun pada kenyataannya di lapangan masih banyak guru PAUD yang kualifikasi akademiknya masih belum memenuhi syarat seperti yang ada pada kebijakan tersebut.

Dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah juga menetapkan ketentuan otonomi pendidikan, sehingga tiap daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan pembangunan dalam segala bidang, tidak terkecuali bidang pendidikan. Hal tersebut dilakukan agar sekolah dapat leluasa dalam mengatur dan mengelola sumber daya dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan. Konsekuensi logis dari peraturan tersebut adalah bahwa sekolah atau lembaga pendidikan di setiap kota harus memiliki pengelolaan pendidikan yang disesuaikan dengan jiwa dan semangat otonomi (Widodo, S, 2008, hlm. 202).

Hal pokok yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan pendidikan berbasis sekolah, selain memberikan wewenang yang lebih besar terhadap sekolah untuk pengelolaannya, diperlukan pula usaha dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka mendukung dan meningkatkan mutu pendidikan. Peningkatan peran serta masyarakat terhadap pengelolaan sekolah dapat berimplikasi lebih terjaminnya keberadaan dan keberlangsungan lembaga pendidikan atau sekolah. Masyarakat akan lebih peduli dan lebih mendukung

program yang dilakukan sekolah, baik mendukung dalam sumber dana atau mendukung dalam pembangunan fisik sekolah. Sekolah yang cenderung mengabaikan peran orang tua atau masyarakat sekitar akan berpengaruh menimbulkan sikap pasif dari orang tua atau masyarakat terhadap sekolah yang berakibat desentralisasi pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan menjadi terhambat (Widodo, S, 2008, hlm. 202). Membangun kemitraan dengan orang tua merupakan hal penting karena orang tua merupakan pendidik pertama dan utama bagi anak sedangkan lembaga PAUD berperan membantu orang tua dalam memberikan pelaksanaan pendidikan yang lebih efektif dan optimal untuk anak.

Selain itu, menurut Hikmah (2016, hlm. 2) bahwa peran masyarakat dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan adalah melakukan pengawasan, dan evaluasi terhadap program pendidikan melalui dewan pendidikan atau komite sekolah. Komite sekolah dibentuk sebagai badan yang menjembatani atau menghubungkan antara pihak sekolah, orang tua murid, dan masyarakat. Pembentukan komite sekolah didasarkan pada kebijakan UU Nomor 75 Tahun 2016 tentang komite sekolah yang mempertimbangkan usaha untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan melalui pembentukan komite sekolah. Hasbullah (2010, hlm. 89-90) menjelaskan bahwa,

“Komite sekolah merupakan badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah”.

Selanjutnya, Hasbullah (2010, hlm. 92-93) menyebutkan bahwa komite sekolah memiliki peran antara lain: (1) Sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*), (2) Sebagai pendukung (*supporting agency*), (3) Sebagai pengontrol (*controlling agency*), dan (4) Sebagai mediator. Berdasarkan penjelasan tersebut, peran komite penting dalam mendukung kegiatan di sekolah. Komite menjadi mitra sekolah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi tentang penyelenggaraan pendidikan.

Komite sekolah sebagai pemberi pertimbangan berperan untuk memberikan masukan kepada sekolah tentang perumusan dan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan sekolah. Komite sekolah sebagai badan pendukung berperan untuk memberi dukungan-dukungan untuk sekolah baik berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan. Komite sekolah sebagai badan pengontrol berperan untuk melaksanakan pengawasan kepada sekolah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan program kegiatan dan keluarga pendidikan. Komite sekolah sebagai badan mediator berperan sebagai mitra sekolah yang menghubungkan atau menjembatani antara sekolah dengan orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Melalui keempat peran yang dimiliki komite sekolah diharapkan dapat mewedahi berbagai aspirasi dari masyarakat dan dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Dengan pengetahuan tentang berbagai peran yang dimiliki komite sekolah hendaknya baik sekolah maupun anggota dari komite sekolah itu sendiri dapat mengoptimalkan peran komite sekolah tersebut dalam usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah sehingga dapat diketahui tingkat keefektifan program yang dimiliki sekolah dalam usaha meningkatkan mutu sekolah tersebut sudah efektif atau masih butuh pengoptimalan. Namun pada kenyataannya, di lapangan banyak permasalahan yang terjadi tentang pelaksanaan dan pengoptimalan peran dari komite sekolah. Hasil penelitian dan pengamatan yang dilakukan Marni dan Samino terkait dengan peranan komite sekolah menyebutkan bahwa peranan komite selama ini masih sangat kurang, alasan yang mendasarinya adalah masalah keterbatasan waktu, dana, dan tenaga pengurus juga anggota komite. Alasan lainnya yaitu ruang gerak yang terbatas dalam memberikan peranannya terhadap sekolah yang dijadikan mitra kerja, kebanyakan sekolah hanya menginginkan tanda tangan dan

stempel dari dewan komite untuk menyetujui atau mengesahkan program tanpa ada pertimbangan bersama (Marni dan Samino, 2015, hlm. 21-22).

Sejalan dengan hasil penelitian di atas, Wardiah, dkk (2015, hlm. 18) menyebutkan dalam jurnal penelitiannya bahwa:

Terdapat banyak kendala yang sering ditemukan komite dalam meningkatkan mutu pendidikan, diantaranya adalah: komunikasi yang terlambat antara sekolah dan wali murid, tidak berlanjutnya program, tidak semua orang tua murid mempunyai pemahaman yang sama tentang pendidikan anaknya, pengawasan yang tidak terstruktur, serta adanya ganjalan hubungan sekolah dengan komite sekolah berkaitan dengan adanya anggapan masyarakat tentang belum sepenuhnya sekolah melaksanakan transparansi dalam berbagai laporan.

Berdasarkan hasil-hasil penelitian tersebut terdapat kendala-kendala dalam pengoptimalan peran yang dimiliki oleh komite sekolah dalam meningkatkan mutu sekolah, hal tersebut mengundang perhatian peneliti untuk melakukan penelitian di salah satu Taman Kanak-kanak di Kabupaten Cirebon. Peneliti tertarik untuk meneliti peran komite sekolah terhadap meningkatkan mutu pendidikan yang ada di KB Nurul Auliya yang beralamat di Jl. Pendidikan Blok Pekauman RT. 02 RW. 01 Desa Kali Tengah, Kabupaten Cirebon.

Untuk mengetahui kondisi komite sekolah di lapangan, peneliti melakukan studi pendahuluan pada beberapa TK di wilayah Kecamatan Tengtani. Berdasarkan observasi dan wawancara singkat dengan kepala sekolah dan masyarakat diperoleh data sebagai berikut. (1) komite belum maksimal dalam mendukung pelaksanaan pendidikan di sekolah, (2) orang tua siswa belum memahami peran komite sekolah, (3) komite kurang komunikasi dengan orang tua siswa, dan (4) kebijakan yang ditetapkan sekolah kurang disosialisasikan pada orang tua siswa. Artinya, keberadaan komite ditingkat Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Belajar belum maksimal menjadi bagian sekolah dalam menjalankan fungsinya pemberi pertimbangan (*advisor agency*), pendukung (*supporting*), pengontrol (*controlling agency*), dan mediator.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melihat lebih jauh terkait bagaimana peran komite sekolah dalam hal ini POMG dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan di KB Nurul Auliya di Desa Kalitengah Kecamatan Tengtani Kabupaten Cirebon. Selain itu, peneliti juga tertarik untuk mengetahui bagaimana hubungan timbal balik yang tercipta antara sekolah dengan POMG di KB Nurul Auliya. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul “*Analisis Peran POMG dalam Usaha Meningkatkan Mutu Pendidikan di KB Nurul Auliya*”.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah yang perlu dirumuskan adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana peran POMG dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan KB Nurul Auliya?
- 1.2.2 Bagaimana kepuasan orang tua atas ikhtiar yang dilakukan POMG dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan yang ada di KB Nurul Auliya?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan umum penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai peran POMG dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan di KB Nurul Auliya. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini antara lain:

- 1.3.1 Mengetahui peran POMG dalam usaha meningkatkan mutu KB Nurul Auliya. Secara rinci meliputi standar TK dalam pengelolaan, sarana dan prasarana, dan pembiayaan.
- 1.3.2 Mengetahui kepuasan orang tua atas ikhtiar yang dilakukan POMG dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan yang ada di KB Nurul Auliya.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang mendalam dan komperhensif tentang peran POMG dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan KB Nurul Auliya. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menambah ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan peran komite sekolah dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diperoleh antara lain sebagai berikut:

1.4.2.1 Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti terkait dengan peran POMG dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan.

1.4.2.2 Bagi Sekolah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh sekolah sebagai bahan pertimbangan untuk lebih mengoptimalkan peran POMG dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan di KB. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi informasi yang lebih detail terkait dengan peran komite di sekolah.

1.4.2.3 Bagi Komite sekolah dan POMG

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan sumber informasi untuk komite sekolah sehingga komite sekolah dapat optimal dalam menjalankan perannya.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Struktur organisasi dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima BAB.

Berikut di bawah ini gambaran umum dari pembahasan dari skripsi ini: BAB I

Pendahuluan, BAB II Kajian Teori, BAB III Metodologi Penelitian, BAB IV Hasil Penelitian, dan BAB V Kesimpulan dan Rekomendasi.

BAB I Pendahuluan, mengemukakan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta struktur organisasi skripsi.

BAB II Kajian Pustaka, membahas tentang teori-teori yang relevan dengan peran komite sekolah dan mutu pendidikan.

BAB III Metode Penelitian, membahas tentang desain penelitian, partisipan dan tempat penelitian, penjelasan istilah, kisi-kisi instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV Temuan dan Pembahasan, membahas tentang hasil penelitian serta pembahasannya berdasarkan hasil temuan penelitian.

BAB V Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi, berisikan tentang kesimpulan dari penelitian, implikasi yang diberikan kepada pihak terkait, dan rekomendasi sebagai sumbangan pemikiran untuk penelitian selanjutnya.